

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan anak jalanan di Kota Jambi merupakan isu sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berakar pada faktor ekonomi semata, tetapi juga pada persoalan struktural seperti lemahnya sistem perlindungan sosial, kurangnya peran keluarga, dan rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya.

Bagi anak jalanan, kondisi kehidupan yang mereka hadapi mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1). Anak jalanan berada dalam situasi yang memprihatinkan—tereksploitasi secara ekonomi, terputus dari pendidikan, dan rentan terhadap kekerasan serta penelantaran. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah, seperti rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan reunifikasi keluarga, sejauh ini belum mampu menjangkau secara menyeluruh dan berkelanjutan karena kurangnya pendekatan berbasis kebutuhan dan hak anak secara holistik.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, peran dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan anak jalanan belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat upaya dari Dinas Sosial dan DPMPPA dalam menindaklanjuti fenomena anak jalanan melalui tindakan responsif dan kegiatan pembinaan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran,

sumber daya manusia, serta minimnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, monitoring dan evaluasi belum berjalan secara sistematis, sehingga tidak ada umpan balik yang memadai untuk penyempurnaan program.

Terkait dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan, kebijakan ini pada dasarnya telah memuat kerangka kerja yang komprehensif, mencakup pendekatan preventif, responsif, rehabilitatif, dan represif. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi ini belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan amanat normatif yang tercantum dalam peraturan tersebut. Kurangnya sosialisasi, minimnya penegakan terhadap pihak yang mengeksploitasi anak di jalanan, dan rendahnya partisipasi masyarakat turut melemahkan efektivitas kebijakan ini.

Secara keseluruhan, penanggulangan anak jalanan di Kota Jambi masih memerlukan komitmen politik yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan integrasi lintas sektor agar kebijakan yang telah disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi anak-anak yang berada di jalan.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk memperkuat peran Pemerintah Kota Jambi dalam penanggulangan masalah anak jalanan:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Instansi Pemerintah Kota Jambi perlu membentuk mekanisme koordinasi terpadu secara reguler antara Dinas Sosial, DPMPPA, Dinas Pendidikan, Satpol PP, serta LSM dan komunitas masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan program rehabilitasi sosial anak jalanan.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pekerja sosial, pendamping anak, dan aparatur pemerintah, terutama terkait pendekatan berbasis hak anak dan teknik rehabilitasi psikososial.
3. Perluasan Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Program rehabilitasi harus diperluas tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek pendidikan, psikologi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan untuk menghindari fenomena anak kembali ke jalan.
4. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur dan berbasis hasil, agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih terarah dan akuntabel.
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Publik Upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak jalanan harus ditingkatkan, melalui kampanye sosial, media massa, serta kegiatan komunitas, untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih ramah anak.
6. Penguatan *Political Will* Pemerintah daerah perlu mempertegas komitmen politiknya dalam pengentasan anak jalanan melalui alokasi anggaran yang

memadai, penguatan regulasi, serta keberanian mengambil kebijakan jangka panjang yang berbasis pada hak anak.

Dengan memperhatikan dan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat mewujudkan sistem perlindungan anak jalanan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, sehingga dapat mengurangi kerentanan sosial dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.